

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti menetapkan kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Good governance berpengaruh terhadap pemberdayaan BUMDes, karena pada dasarnya ketika pemerintah desa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka tercipta lingkungan kelembagaan yang mendorong BUMDes untuk berkembang secara optimal. Penerapan good governance memberikan ruang bagi masyarakat dan pengelola BUMDes untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha formal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan BUMDes, karena pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Ketika dana desa dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan perencanaan, maka pemanfaatannya untuk kegiatan usaha BUMDes menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja ekonomi BUMDes.

3. Good governance dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberdayaan BUMDes, karena kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Penerapan good governance tanpa didukung oleh akuntabilitas pengelolaan dana desa berpotensi menimbulkan tata kelola yang bersifat formalistik, sementara akuntabilitas tanpa prinsip tata kelola yang baik dapat menghambat partisipasi dan inovasi. Oleh karena itu, sinergi antara good governance dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam mendorong pemberdayaan BUMDes.
4. Pemberdayaan BUMDes tidak hanya dipengaruhi oleh good governance dan akuntabilitas, melainkan juga oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi usaha, dukungan kebijakan daerah, serta partisipasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang belum sepenuhnya menjelaskan variasi pemberdayaan BUMDes, sehingga diperlukan perhatian terhadap faktor-faktor pendukung lainnya agar BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan.

5.2 Keterbatasan Peneliti

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur ilmiah, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu good governance dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dalam menganalisis

pemberdayaan BUMDes. Padahal, pemberdayaan BUMDes juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi usaha, dukungan kebijakan daerah, akses permodalan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.

2. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dengan pendekatan kuantitatif, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada persepsi responden. Pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menggali aspek kontekstual dan dinamika sosial yang lebih mendalam terkait pengelolaan BUMDes dan dana desa.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada BUMDes yang berada di Kabupaten Tanah Datar, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas ke daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda.
4. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap perubahan kebijakan atau dinamika pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa di Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam hal transparansi informasi publik, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta efektivitas pelaksanaan program desa. Pemerintah desa juga disarankan untuk memperkuat sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Saran bagi Pengelola BUMDes

Pengelola BUMDes disarankan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan profesionalisme dalam mengelola unit usaha desa. Upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran sangat diperlukan agar BUMDes mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan pasar. Selain itu, pengelola BUMDes perlu memperkuat inovasi usaha dan memperluas jaringan kerja sama dengan pihak eksternal.

3. Saran bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif terhadap pengembangan BUMDes, baik dalam bentuk pendampingan teknis, pelatihan, maupun pengawasan. Pemerintah daerah juga disarankan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam rangka menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kondusif bagi keberlanjutan BUMDes.

4. Saran bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung keberadaan dan kegiatan BUMDes, baik melalui partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan produk dan layanan BUMDes. Partisipasi masyarakat yang aktif akan memperkuat legitimasi sosial BUMDes dan mendorong terciptanya usaha desa yang berkelanjutan.

5. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang relevan, memperluas lokasi penelitian, serta menggunakan pendekatan metodologi yang lebih beragam, seperti metode kualitatif atau mixed methods. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan BUMDes di berbagai konteks daerah.